

KAJIAN INDEKS MUTU HIDUP DAN KEMISKINAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERDESAAN MENUJU ERA GLOBALISASI

Oleh : Hastuti
(FPIPS IKIP Yogyakarta)

Abstrak

Pembangunan Jangka panjang tahap ke II segera memasuki lima tahun kedua, keberhasilan telah banyak dicapai antara lain dengan peningkatan kesejahteraan penduduk terutama diperdesaan bahwa jumlah penduduk miskin di daerah tersebut semakin berkurang. Indeks Mutu Hidup penduduk perdesaan yang semakin meningkat merupakan pertanda peningkatan jumlah penduduk sejahtera dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup yang lebih layak. Penghargaan atas keberhasilan pengentasan kemiskinan yang diterima pemerintah Indonesia dari UNDP pada September 1997 semata-mata karena prestasi pemerintah yang mampu menekan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun, meskipun untuk membebaskan kemiskinan di seluruh lapisan penduduk masih tetap memerlukan perjuangan secara berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan penduduk memberikan peluang bagi langkah pembangunan di segala sektor sehingga seluruh penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan memiliki kesempatan turut serta dalam laju pembangunan.

Menghadapi era globalisasi yang semakin dekat seluruh lapisan penduduk di segenap penjuru Indonesia harus dipersiapkan. Tantangan tersebut akan menjadi berat apabila masih banyak dijumpai penduduk miskin. Perdesaan yang memiliki jumlah penduduk miskin relatif lebih besar memerlukan perhatian yang lebih serius untuk pengembangan di kawasan tersebut. Pengembangan perdesaan akan lebih mudah dilaksanakan dengan melibatkan segenap potensi perdesaan oleh karena itu mutu kehidupan yang lebih baik dan terbebas dari belenggu kemiskinan merupakan prasyarat untuk kelancaran pengembangan di perdesaan. Keadaan penduduk yang terjamin kesehatan, gizi, pendidikan dengan pendapatan yang memadai memungkinkan penduduk memiliki kesempatan lebih luas untuk berperan aktif dalam setiap aktifitas kehidupan lebih maju yang merupakan satu kondisi pertanda era globalisasi. Perdesaan merupakan luas wilayah Indonesia yang mencapai 65 persen sehingga potensi tersebut harus dikembangkan mengingat era globalisasi harus dihadapi oleh penduduk di wilayah tersebut.

Pendahuluan

Saat ini pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJP II) telah berlangsung guna mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri berdasar Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Sasaran umum pembangunan tersebut adalah tumbuhnya sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat Indonesia melalui peran serta, efisiensi dan produktivitas rakyat dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lahir batin (BP 7 Pusat, 1996:87).

Berbagai langkah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan penduduk dilakukan agar segera terwujudnya kesejahteraan penduduk secara adil dan merata. Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diiringi dengan peningkatan pemerataan diberbagai sektor antar wilayah merupakan tantangan yang masih harus diperjuangkan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tahap kedua pembangunan jangka panjang mampu mencapai tingkat pertumbuhan cukup tinggi yakni 6 persen sampai 7 persen per tahun (BPS, 1994). Seiring dengan keberhasilan pertumbuhan ekonomi selama ini antara lain ditandai dengan kemampuan menekan jumlah penduduk miskin dari 60 persen pada tahun 1970 menjadi 11 persen pada tahun 1997 (Kompas, 1997:4). Orientasi pembangunan guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi harus mampu mengangkat kehidupan penduduk menuju peningkatan kesejahteraan secara merata antar wilayah yang diharapkan penduduk miskin di Indonesia hanya tinggal kurang dari 5 persen pada akhir 2005.

Todaro (1984:168) mengemukakan bahwa pembangunan merupakan proses multidimensional yang menyertakan proses perubahan dalam struktur kehidupan meliputi struktur sosial, sikap mental, kelembagaan, percepatan dalam pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan atau penekanan ketimpangan maupun pemberantasan kemiskinan absolut. Pembangunan akan dapat dikatakan memenuhi sasaran apabila mampu menekan jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan dengan pemerataan keseluruhan lapisan antar wilayah. Oleh karena itu penduduk perdesaan yang memiliki berbagai keterbatasan fasilitas menuju perbaikan kehidupan memerlukan strategi pengembangan tersendiri agar mereka dapat segera hidup sejajar dengan lapisan penduduk yang lebih maju.

Peningkatan taraf hidup penduduk perdesaan agar terbebas dari belenggu kemiskinan merupakan modal dasar yang harus segera dipersiapkan menghadapi era globalisasi. Sumber pendapatan penduduk perdesaan yang sebagian besar masih bertumpu pada sektor pertanian dengan lahan usahatani

yang kian terbatas mengharuskan penduduk perdesaan mencari alternatif sumber pendapatan yang lebih bervariasi baik di dalam usahatani maupun di luar usahatani. Pemanfaatan sumberdaya perdesaan, perbaikan infra struktur di bidang transportasi, komunikasi, sosial, ekonomi maupun kesehatan harus segera diperhatikan dalam rangka pengembangan perdesaan. Melalui pengembangan perdesaan tersebut harapannya adalah semakin meluasnya sumber pendapatan yang diharapkan berdampak meningkatkan taraf hidup penduduk di perdesaan secara menyeluruh terbebas dari belenggu kemiskinan. Kondisi demikian merupakan posisi kemapanan bagi penduduk perdesaan untuk kokoh menghadapi era globalisasi yang merambah pada seluruh sektor kehidupan yang siap atau tidak siap harus dihadapi.

Indeks Mutu Hidup dan Kemiskinan

Indeks Mutu Hidup didasarkan pada angka kematian bayi, angka harapan hidup dan angka melek huruf yang berkisar pada skala 0 (nol) sampai 100 (Said Rusli, 1995 : 17). Angka kematian terendah dengan skor 100 adalah apabila terjadi 7 kematian bayi setiap 1000 kelahiran bayi dan skor nol (0) apabila dalam setiap 1000 kelahiran bayi hidup terdapat 229 kematian bayi. Angka harapan hidup pada umur hingga satu tahun adalah 77 tahun paling tinggi dengan skor 100 dan harapan hidup 38 tahun dengan skor nol. Angka melek huruf apabila seluruh penduduk berusia 10 tahun keatas dapat membaca dan menulis huruf latin secara teoritis diberi skor 100. Indeks Mutu Hidup merupakan angka rata rata dari Indeks kematian bayi, Indeks harapan hidup dan Indeks melek huruf dan diberi skor sama (Said Rusli 1995:18). Setiap wilayah di Indonesia dapat ditelusuri dengan cermat mengenai Indeks Mutu Hidup dan kemiskinan yang menggejala sebagai kenyataan yang terjadi di lapangan.

Berbagai upaya terus dilakukan melalui strategi yang bervariasi dalam rangka pengentasan kemiskinan selama masa pembangunan diberbagai sektor kehidupan agar segera terwujud peri kehidupan penduduk yang sejahtera lahir batin. Masalah kemiskinan yang lekat dengan perdesaan merupakan issue yang terus digulirkan berkaitan dengan pengembangan perdesaan. Teori-teori tentang kemiskinan agar kondisi tersebut tidak melanda pada kehidupan manusia banyak dikembangkan oleh berbagai ahli yang inti pokoknya adalah agar diperoleh formula yang tepat sakhiih dan mangkus untuk pemecahan masalah kemiskinan. Pendapat berbagai ahli dengan latar belakang disiplin ilmu yang bervariasi akan menghasilkan formula yang dipengaruhi oleh visi

masing-masing, sebagai contoh ahli sosiologi akan memandang kemiskinan sebagai masalah sosial yang tentu memerlukan pemecahan dengan pendekatan sosial, ahli ekonomi akan memandang kemiskinan dengan pemecahan perbaikan ekonomi, ahli kesehatan akan melontarkan pemecahan dengan orientasi kesehatan yang merupakan modal dasar bagi penduduk untuk mampu bekerja dan berfikir guna memperbaiki taraf hidup penduduk.

Tinbergen sebagai ahli sosiologi menitikberatkan bahwa keberhasilan penanggulangan masalah kemiskinan dicerminkan melalui terjaminnya masa depan pada kondisi yang baik, terjaminnya kebebasan dan peningkatan harga diri. Teori Tinbergen ini kemudian disempurnakan terutama untuk pengentasan kemiskinan di perdesaan melalui teori yang mendasarkan pada peningkatan Indeks Mutu Hidup (Astrid S Susanto, 1995:38. Said Rusli dkk, 1995:12). Sasaran masalah meliputi angka kematian bayi dibawah umur 1 tahun berkurang menjadi 50 kemungkinan bayi meninggal dari setiap 1000 kelahiran, umur harapan hidup menjadi lebih panjang yang ditargetkan 77 tahun serta angka melek huruf untuk tahun 2000 adalah 75 persen penduduk harus dapat membaca.

Secara teoritis terdapat bermacam konsep untuk mengukur kemiskinan dan dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut yang mengkaji garis kemiskinan dan kemiskinan relatif mengkaji Gini Ratio (Said Rusli dkk, 1995:14). Pengukuran kemiskinan absolut sebagaimana dilakukan Sayogyo (1982), pengukuran dari BPS dan Bangdes (1976-1990) dengan menghitung pengeluaran setara beras per kapita. Ukuran kemiskinan yang lebih mendasar dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (PBB) dan pendekatan pengeluaran konsumsi (BPS) banyak diterapkan untuk kajian masalah kemiskinan. Pengukuran kemiskinan relatif mendasarkan pada Gini Ratio, Bank Dunia mengambil klasifikasi, tingkat ketidakmerataan tinggi, apabila 40 persen penduduk terbawah menerima jumlah pendapatan lebih kecil dari 12 persen seluruh pendapatan, apabila pendapatan antara 12 - 17 persen berarti ketidakmerataan sedang dan lebih dari 17 persen tergolong ketidakmerataan pendapatan rendah (Sigit Hananto, 1987 : 18). Pengukuran ketidakmerataan sebenarnya dapat dibedakan menjadi dua pendekatan yaitu, pengukuran pada kurun waktu tertentu untuk mengetahui ketimpangan pendapatan antar wilayah dan pengukuran yang bersifat inter temporal yang bermanfaat untuk melihat kearah mana terjadinya perubahan distribusi pendapatan pada wilayah tertentu (Said Rusli dkk, 1995:15). Pembahasan tentang kemiskinan tidak akan dapat terlepas dari kajian Indeks

Mutu Hidup yang variabel didalamnya mempunyai kaitan erat dengan kondisi keberdayaan penduduk untuk akses dalam peningkatannya. Terutama mengenai kesehatan yang pada dasarnya berbanding lurus dengan taraf hidup penduduk.

Kemiskinan Di Perdesaan

Kemajuan infra struktur di Jawa yang menjadikan terbuka seluruh kawasan tersebut dari isolasi antar wilayah didalamnya turut memberi peranan pada semakin bervariasinya sumber pendapatan di Jawa tidak hanya bertumpu pada sektor pertanian yang cenderung statis apabila tidak dilakukan renovasi di bidang pertanian. Petani di Jawa yang hanya mengandalkan sumber pendapatan dari sektor pertanian dituntut setiap rumah tangga selayaknya memiliki tanah garapan terdiri dari 0,7 hektar sawah tadah hujan ditambah 0,3 hektar pekarangan (Masri Singarimbun dan Penny, 1976:18). Oleh karena itu tanpa perluasan ekonomi di luar sektor pertanian akan memperparah kemiskinan di Jawa.

Kemiskinan merupakan fenomena yang banyak dijumpai di banyak negara berkembang dimana kawasan tersebut masih memiliki dominasi perdesaan dengan lebih 40 persen penduduk terlibat di sektor pertanian secara tradisional (Adelman dalam Lewis dan Kallab, 1987:61). Fakta di Indonesia sebagai negara berkembang ternyata tidak berbeda dengan fenomena di atas dengan penduduk miskin 67 persen bertempat tinggal di perdesaan yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian (BPS, 1995). Lahan pertanian merupakan faktor produksi utama bagi golongan penduduk ini bahkan bagi kawasan perdesaan terpencil yang sulit mengakses sumber pendapatan yang lebih bervariasi dari usaha di luar usahatani maka faktor produksi yang sangat menentukan akan dipengaruhi oleh keberadaan lahan pertanian. Perbaikan pendapatan penduduk di perdesaan melalui perbaikan di sektor pertanian telah dilaksanakan bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup di perdesaan ternyata belum mampu menyentuh secara keseluruhan pada setiap lapisan penduduk. Paket Revolusi Hijau yang mulai populer sekitar tahun 70 an justru berdampak pada semakin memprihatinkannya petani di perdesaan sehingga tidak mampu menyelenggarakan usahatani yang padat modal sebagai ciri paket pembangunan pertanian tersebut. Dampak selanjutnya adalah pelepasan lahan pertanian oleh petani kecil yang pada umumnya berlahan sempit dan kekurangan modal (Booth, 1991:56). Pemusatan penguasaan lahan akhirnya sulit dihindarkan dan kemiskinan di perdesaan semakin parah terutama fenomena kemiskinan relatif semakin kentara meskipun pada awalnya gejala tersebut hampir tidak tampak jelas di perdesaan. Fenomena ini

menandai adanya kemiskinan di perdesaan baik secara absolut maupun relatif. Upaya yang perlu segera dilakukan adalah mengangkat mereka agar tidak semakin tertinggal dalam lembah kemiskinan melalui pemanfaatan sumberdaya perdesaan dengan penganekaragaman kegiatan ekonomi tanpa harus tercabut dari akar ekonomi perdesaan yang tetap berbasis pada sektor pertanian (Agricultural Basic) menuju pada kegiatan agroindustri (Mubyarto, 1992:2). Langkah tersebut dipandang sebagai cara yang tepat untuk batu loncatan penduduk perdesaan yang menggantungkan hidupnya dari usahatani dituntut harus beralih pada kondisi ekonomi industri. Melalui tipe kegiatan ekonomi perdesaan yang diarahkan pada kegiatan agroindustri diharapkan penduduk perdesaan akan memperoleh dampak positif dari dinamisasi ekonomi secara global. Harapannya penduduk perdesaan akan terhindar dari term of trade yang biasanya dialami karena semakin rendahnya nilai jual produksi pertanian. Produksi pertanian yang diorientasikan pada pemenuhan bahan mentah industri maupun untuk kepentingan pasar atau tanaman komersial tentu saja akan menguntungkan bagi penduduk yang bergantung dari kegiatan produksi pertanian Chirstianto, 1992:2).

Pertanian di Indonesia pada dasarnya masih berbasis di Jawa meskipun lahan pertanian di kawasan tersebut semakin sulit dikembangkan secara ekstensifikasi akibat semakin mendesaknya kepentingan penduduk akan lahan guna peruntukkan non pertanian. Upaya yang dapat diandalkan untuk pengembangan pertanian di Jawa adalah melalui cara intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi pertanian agar terdapat perubahan kondisi ekonomi petani ke taraf hidup yang memadai (Soekartawi, 1990:240). Kondisi pertanian yang buruk pada petani lapisan bawah dimana penguasaan lahan mereka sempit sebagai dampak Revolusi Hijau tahun 70 an dengan gejala akumulasi penguasaan lahan pada kelompok elit perdesaan pada kurun waktu terakhir justru menampakkan perubahan kondisi. Kemiskinan yang terjadi perdesaan dan melanda golongan terbawah di perdesaan yakni mereka yang berlahan sempit dan tidak memiliki akses di dalam pemilikan modal melalui konsep pertanian moder "agroindustri" ternyata banyak mengalami perbaikan ekonomi. Petani di Jawa yang pada umumnya berlahan sempit justru kemiskinan sebagai dampak akumulasi lahan pertanian dari rentetan dampak Green Revolution kurang nampak meskipun jumlah petani yang tidak berlahan semakin bertambah kuantitasnya (Manning, 1988:75). Fakta yang menyertai perubahan sosial ekonomi di Jawa karena kemajuan di sektor ekonomi non pertanian mampu sebagai alternatif bagi petani perdesaan untuk mencari sumber pendapatan di luar sektor pertanian.

Pengembangan Perdesaan Menghadapi Era Globalisasi

Globalisasi di berbagai sektor kehidupan akan merambah hingga ke seluruh wilayah sebagai konsekuensi dari terbukanya seluruh jaringan kehidupan. Perdesaan harus dikondisikan untuk memiliki kesiapan menghadapi era globalisasi sehingga diharapkan akan lebih mapan bagi penduduknya mengembangkan berbagai aktifitas ekonomi secara global. Oleh karena itu suasana yang kondusif untuk memajukan perdesaan harus segera diciptakan. Kondisi tersebut tidak akan memungkinkan didalam pengembangan perdesaan apabila penduduk dikawasan tersebut dalam kondisi yang diliputi kemiskinan serta memiliki indeks mutu hidup yang rendah.

Langkah yang perlu segera dilaksanakan adalah mengupayakan perdesaan menjadi lebih dinamis dengan penduduk yang memiliki taraf hidup meningkat serta indeks mutu hidup yang tinggi. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan peningkatan tersebut antara lain melalui berbagai program perbaikan perdesaan. Program tersebut antara lain melalui peningkatan pelayanan kesehatan (kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi keluarga, efektifitas pelayanan pos Yandu serta peningkatan pelayanan PUSKESMAS). Langkah tersebut diupayakan pada dasarnya bertujuan agar penduduk perdesaan memiliki derajat kesehatan memadai yang dapat tercerminkan dari angka harapan hidup yang semakin meningkat. Pemberdayaan penduduk perdesaan terus diupayakan agar mereka dapat memiliki kemampuan baca tulis secara menyeluruh di setiap lapisan penduduk antara lain melalui kejar paket A dan kejar paket B, maupun program pembelajaran setara pendidikan dasar.

Strategi pengembangan perdesaan yang dilaksanakan melalui pendekatan dari atas (*Top Down*) dan pendekatan dari bawah (*Bottom Up*) harus berjalan selaras agar sasaran atau target dapat terwujud secara tepat dan cepat. Pendekatan dari atas sangat berperan untuk memberikan peluang pengembangan berupa stimulus bantuan modal, ketrampilan, maupun fasilitas lain yang pada hakekatnya masih sangat diharapkan di perdesaan. Pendekatan dari bawah memiliki fungsi strategis mengingat sasaran sebenarnya pengembangan perdesaan adalah membawa penduduk di perdesaan agar memiliki kemampuan untuk menghadapi dan mengantisipasi kemajuan menggejala secara global.

Pengembangan harus memperhatikan azas keseimbangan untuk menciptakan kemajuan ekonomi yang dibarengi dengan perbaikan kondisi sosial masyarakat dengan penekanan pemerataan dan

keadilan melalui percepatan peningkatan pendapatan dan taraf hidup penduduk di perdesaan (Todaro, 1984:476). Oleh karena itu secara nyata bahwa pengembangan perdesaan harus menyentuh upaya perbaikan kesempatan kerja disektor pertanian dan non pertanian, pemerataan pendapatan, perbaikan kesehatan, gizi, perbaikan lingkungan dan perumahan di perdesaan, memperluas kesempatan memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal. Ketimpangan antara kemajuan perkotaan dan perdesaan sehingga perdesaan lebih bersifat subordinasi banyak ditentukan oleh ketidak berdayaan penduduk perdesaan memanfaatkan peluang ekonomi, sosial guna peningkatan taraf hidupnya. Keterbatasan yang dimiliki penduduk di perdesaan karena rendahnya pendapatan, rendahnya tingkat kesehatan serta rendahnya pendidikan dan keterampilan merupakan wahana yang subur untuk bersemainya kemiskinan penduduk dengan indeks mutu hidup yang rendah, sebagai kondisi yang menjadi penghambat bagi pengembangan perdesaan. Faisal Kasryno dkk (1988:3) mengemukakan bahwa pengembangan perdesaan diarahkan pada perbaikan aksesibilitas dan perbaikan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di perdesaan agar memiliki kesempatan yang seluas luasnya memperoleh sumber pendapatan dengan layak sehingga mampu mengangkat derajat kehidupan pada tingkat uang lebih baik.

Konsep pengembangan ekonomi berimbang perlu diterapkan dalam pengembangan di perdesaan agar tidak mengalami ketertinggalan dengan perkotaan yang memang telah lebih siap menghadapi era globalisasi. Perbaikan pendapatan dari sektor pertanian yang menjadi soko guru perekonomian di perdesaan perlu di lakukan antara lain melalui, kebijakan harga beras yang fleksibel serta efisiensi penggunaan faktor produksi pertanian, peningkatan produksi sumber daya alam di perdesaan, pengurangan subsidi saprodi pertanian agar mampu mendorong terciptanya efisiensi penggunaannya, penyempurnaan paket teknologi pasca panen (Faisal Kasryo dkk, 1988:7).

KESIMPULAN

Pengembangan perdesaan yang mendasarkan pada pengentasan kemiskinan serta meningkatkan indeks mutu hidup merupakan pola pembangunan perdesaan yang diharapkan memberikan kemanfaatan optimal pada segera terwujudnya satu kondisi perdesaan yang lebih maju secara menyeluruh. Perdesaan yang terbebas dari belenggu kemiskinan serta mempunyai indeks mutu hidup yang lebih baik memungkinkan perdesaan akan lebih mudah menerima pesan-pesan pembaharuan yang didukung oleh kemampuan masyarakatnya menerima inovasi sebagai ciri pengembangan. Upaya pengembangan

perdesaan harus selalu memperhatikan sumberdaya yang tersedia di perdesaan agar mampu menyerap kebijakan pembangunan yang berasal dari luar perdesaan / penentu kebijakan.

RUJUKAN

- Astrid S, Susanto. (1995). *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta : Bina Cipta
- Agus Pakpahan dkk. (1995). *Kemiskinan di Perdesaan, Masalah dan Alternatif Penanggulangannya*. Bogor : PPEP - IPB
- Booth, Anne. (1991). *The Non Agricultural side of An Agricultural Economy Java, 1500 - 1900*. Pp 14-40. In Alexander, Paul, Petter B o o m g a r d and Benyamin White. Amsterdam : Royal Tropical Institute
- BP 7 Pusat. (1995). *Bahan Penataran*. Jakarta : BP 7
- BPS. (1992). *Kemiskinan Dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia 1976 - 1990*. Jakarta : BPS
1995. Biro Pusat Statistik. Jakarta
- Christianto, W. (1992). *Subsidi Pertanian Dan Eksistensi agroindustri*. Yogyakarta : Faperta - UGM
- Dunham, David. (1993). *Crop Diversifikation and Export Growth Dynamics Of Change in The Srinlanka Peasant Sector*. SAGE London, New Bury Park and Delhi
- Egbert, De Vries. (1985). *Pertanian Dan Kemiskinan di Jawa*. Jakarta : YOI dan Gramedia
- Faisal Kasryno. (1988). *Perubahan Ekonomi Perdesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang*. Bogor : PPAE BPPP - IPB
- Kompas. (1997). *Penduduk Miskin Di Dunia Bertambah*. Edisi 9 September 1997. Jakarta : Gramedia
- Lewis, JP dan Kallab V. (1987). *Mengkaji Ulang Strategi strategi Pembangunan*. Jakarta : UI Press
- Manning, Chris. (1988). *The Green Revolution, Employment, and Economic change in Rural Java. A Reasessment of Trends Under*
The New Order. Asean Economic Research Unit Institute of Southeast Asean Studies KIT Leiden V b- 1631 - N
- Mubyarto. (1992). *Ekonomi Pertanian Indonesia Menjelang Pembangunan Jangka Panjang II*. Yogyakarta : Faperta- UGM
- Said Rusli dkk. (1995). *Metodologi Identifikasi Golongan Dan Daerah Miskin*. Jakarta : Gramedia
- (1995). *Kajian Indeks Mutu Hidup di Kab. Indragiri Hulu, Riau*. Jakarta : Gramedia
- Sayogyo. (1982). *Indikator Sosial Dan Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Bogor : LPSP - IPB
- dkk. (1992). *Kemiskinan Dan Pembangunan di Propinsi NTT*. Bogor : PSP - IPB
- Singarimbun, Masri dan DH Penny. (1976). *Penduduk dan Kemiskinan Kasus Srihardjo di Perdesaan Jawa*. Jakarta : Bhatara Karya Aksara
- Todaro, M. (1984). *Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga*. Jakarta : Gramedia